

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2013. *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftaran*. Sinar Grafika. Jakarta.
- A.P. Parlindungan. 1993. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju. Bandung.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1995. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Effendi Perangin. 1989. *Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta.
- Iman Soetikno. 1990. *Politik Hukum Agraria Nasional*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Irawan Soerodjo. 2014. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Laks Bang Mediatama. Yogyakarta.
- Julius Sambiring. 2018. *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara. Kencana*. Jakarta
- Mudakir Iskandar Syah. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Supriyadi. 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*. PT Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- 2018. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Doli D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset*. Gramedia. Jakarta.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.
- 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana. Jakarta.
- 2013. *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2018. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Kencana. Jakarta.
- Wayan Suhendra. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Jurnal

- Ahmad Fajri *et.al.* 2018. "Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Perspektif Ekonomi Islam". *Journal Of Economics & Business Sharia*. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Dayat Limbong. 2017. "Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Penertibannya". Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia. Manado.
- Deissy Mokodompit, Jenny Morasa dan Jessy Warongan. 2017. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi.
- Fitria Ayu Lestari Niu, Lintje Kalangi dan Linda Lambey. 2017. "Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi.
- Hasyim Adnan. 2018. "Fungsi Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam Rangka Tertib Administrasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Pandeglang". *Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*.
- Muhammad Ilham Arisaputra *et.al.* 2017. "Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat". *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.
- Rugeri Roning. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997". Lex Crimen. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Siti Romlah. 2018. "Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016". JOM FISIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Sitti Maryam Patajai. 2019. "Nilai Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah". Al-Ishlah. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia.
- Solechan. 2019. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik". *Administrative Law & Governance Journal*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.
- Tody Sasmitha, Haryo Budhiman dan Sukayadi, 2014. "Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010), Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Urip Santoso. 2008. "Pengaturan Hak Pengelolaan". *Jurnal Media Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2012. "Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional". *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- 2012. "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah". *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- 2013. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah". *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- 2013. "Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pihak Ketiga". *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- 2017. "Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah". *Jurnal Era Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Tarumanagara.

----- 2019. "Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah". Jurnal Era Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Tarumanegara.

Skripsi

Mutmainna. 2021. *Pengelolaan Aset Tanah Daerah*. Skripsi. Sarjana Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Fitri Wulandari. 2019. *Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. Skripsi. Sarjana Ilmu Sosial. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.

Made Rosdiana Putra. 2017. *Problematika Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*. Skripsi. Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

Tesis

Hardiyanti. 2020. *Analisis Penyelesaian Konflik Pengelolaan Aset Tanah Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Puspa Dinar. 2016. *Manajemen Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah daerah Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara*. Tesis. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Terbuka. Jakarta.

Internet

Jurnalnews.net, <https://jurnalnews.net/2020/08/11/bupati-soppeng-tak-mampu-buktikan-dokumen-tanah-ornament-desatinc/,%20diakses%20pada%2030%20Oktober%202021https://advokasi.aji.or.id/read/datakekerasan/1924.html?y=2021&m=1&ye=2021&me=3>, diakses pada 25 November 2021, Pukul 20.14 WITA.

Kementerian Keuangan RI. Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Barang Milik Daerah. <https://mail.google.com/mail/u/0/?plid=ACUX6DPmjD9nxr-yoXEv-qEzxqpbw9dvSpigQO4#inbox/FMfcgzGpGTHKVCZKDDPSrBcgbGDZHNx?projector=1&messagePartId=0.1>

Penguasaan Fisik Dapat Menimbulkan Hak Baru. www.litigasi.co.id. blog, diakses pada 14 Juli 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Banunan dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Wawancara

Ardiansyah, Wawancara, Staf Bagian Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, 14 April 2022.

Arham MS., Wawancara, Ketua Lembaga Kajian Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM Indonesia), Soppeng, 12 April 2022.

Fitrah, Wawancara, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, 14 April 2022.

Mannahawu, Wawancara, Kepala Desa Tinco, 12 April 2022.

Vandhi, Wawancara, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Soppeng, 14 April 2022.

Sumber Lain

Kelengkapan Data/Dokumen laporan permasalahan tanah di Desa Tinco yang ditujukan kepada Ombudsman. Nomor surat 561.04/BPP.LHI/WTS/22/LPT-KDD.DT/I/20. 03 Januari 2020.